



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 06 Desember 2025
Kepada:

- Yth. 1. Bupati Bandung
2. Bupati Bandung Barat
3. Bupati Sumedang
4. Wali Kota Bandung
5. Wali Kota Cimahi
di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM

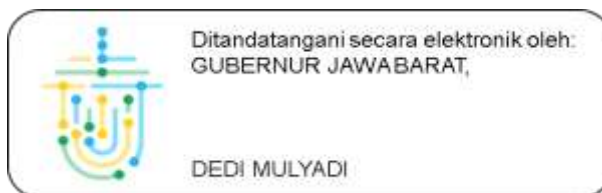
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN PERUMAHAN
DI WILAYAH BANDUNG RAYA

Sehubungan dengan fenomena terjadinya bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Bandung Raya, (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi), perlu dilakukan mitigasi untuk mengatasi bencana lanjutan dan/atau berulang melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung, agar:
 - a. sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang,
 - b. tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan
 - c. memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung.
4. Memastikan seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
5. Melaksanakan penilikan teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG.
6. Mewajibkan pemulihan atau penghijauan kembali atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, dan
7. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

GUBERNUR JAWA BARAT,



4DD7B36CE3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4DD7B36CE3>